

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Linggo adalah petani dan buruh tani. Hal ini dapat dimaklumi, disamping karena luas potensinya sebagian besar tanah pertanian, juga desa Linggo termasuk daerah pedesaan yang jauh dari kota. Penduduk yang menekuni profesi buruh tani ini kadang-kadang dapat menjadi penggarap, pembajak atau santri.

4. Keadaan Agama

Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya mayoritas penduduk desa Linggo adalah memeluk agama Islam dan taat dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Dimana nilai-nilai Islam berurat akar dan mentradisi dalam tata kehidupannya.

Kenyataan praktis dari perkembangan agama pada masyarakat desa Linggo dilihat pada jumlah pemeluk agama sebagai berikut :

nya, misalnya karena sudah mempunyai pekerjaan lain yang tetap.

- Tidak mempunyai kemampuan, baik karena tenaga yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menggarap sawah atau karena tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidang pertanian.

Di pihak lain banyak penduduk desa Linggo yang tidak memiliki tanah/sawah, akan tetapi mempunyai keahlian dan ketrampilan mengolah areal pertanian. Dan hanya dengan mengandalkan tenaga dan keahliannya sebagai buruh tani, mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

Disebabkan areal sawah yang garapannya diberikan pemilik sawah terhadap penggarap terlalu luas dan tidak mungkin dikerjakan sendiri atau memang karena penggarap sudah memiliki pekerjaan yang lain atau juga karena penggarap tidak mempunyai modal penggarapan, penggarap menyerahkan sebagian pekerjaan pengolahan sawah kepada pihak ketiga yaitu pembajak dan santri.

Ikut sertanya pembajak dan santri dalam penggarapan sawah ini dilatar belakangi oleh rasa belas kasihan penggarap melihat kondisi ekonomi pembajak dan santri yang lemah dan agar pembajak dan santri ikut bergembira atas panennya sawah penggarap. Disisi lain para pembajak dan santri tersebut mengharapkan keikut serta

annya tersebut dapat menabung padi dirumah-rumah mereka sebagai tambahan perbekalan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

C. Pengertian Bagi Hasil Tanaman Padi Dengan Sistem Bajekan

Pegertian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan yang dilakukan oleh para petani dengan Linggo adalah suatu perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap dalam pengelolaan sawah dengan tujuan membagi hasil keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan dalam pengolaan sawahnya melibatkan pihak-pihak lain (pembajak dan santri).

Dalam prakteknya pengertian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan adalah penyerahan sawah oleh pemilik sawah kepada pihak penggarap, yang selanjutnya pengelolaan sebagian tanah yang meliputi penanaman, penyiangan rumput dan pemanenan diserahkan kepada pembajak.

Dipihak lain, santri bertugas membantu penyelenggaraan pengelolaan sawah baik kepada pemilik sawah penggarap atau pembajak.

Selanjutnya wakil santri yang jumlahnya berkisar antara tiga sampai sepuluh orang mendatangi pemilik tanah, penggarap dan pembajak untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya.

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Desa Linggo hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara tertulis. Mereka hanya mendasarkan kepada kepercayaan pribadi masing-masing, yang biasanya tidak akan saling mengingkari perjanjian. Seperti akad yang dilakukan Haji Abdul Kholik (Petani pemilik tanah) dengan Bapak Samsul Bahri sebagai penggarap, yang isinya :

"Bapak Samsul Bahri sebagai petani penggarap bersedia dan sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai petani penggarap dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (adat istiadat dan hasilnya akan dibagi dalam jumlah dan jenis yang sama".

Juga perjanjian bagi hasil dengan sistem bajekan ini tidak menggunakan saksi-saksi yang dapat menyaksikan perjanjian bagi hasil mereka. Begitu juga perjanjian yang dilakukan antara penggarap dengan pembajak dan santri.

Dalam hal ini perjanjian, tidak pernah di sebutkan dalam proses perjanjian, karena masing-masing telah mengetahui bentuk bagi hasil berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hanya dalam ketentuan jangka waktu perjanjian, pemilik sawah memberikan jangka waktu satu masa penanaman padi.

Bila setelah panen, perjanjian bagi hasil telah berakhir akan tetapi perjanjian dapat diperbaharui bila pemilik merasa ada kecocokan.

Namun sering kali perjanjian itu harus diakhiri sebelum habis jangka waktunya karena sesuatu hal, antara lain :

- Salah satu pihak merugikan pihak lain yang menjadi sekutunya. Pada umumnya penggarap, pembajak dan santri yang sering kena kasus ini. Misalnya Santri mengambil padi tanpa sepengetahuan penggarap atau pemilik sawah.
- Salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugas atau kewajibannya. Misalnya penggarap menelantarkan sawah garapannya.

2. Pihak yang terlibat dalam bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan

